

---

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGURUH TERHADAP KAPASITAS FISKAL DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA PADA PERIODE 2019-2020

Oleh :

**Widi Dian Istiningsih**

Ekonomi Bisnis / Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

[widy4020@gmail.com](mailto:widy4020@gmail.com)

Andy Dwi Bayu Bawono,

Ekonomi Bisnis / Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

[Adbb122@ums.ac.id](mailto:Adbb122@ums.ac.id)

---

### Article Info

#### Article History :

Received 15 May - 2022

Accepted 29 May - 2022

Available Online

30 May - 2022

### Abstract

*Local government autonomy becomes independent in managing its authority. This can be seen from the strengthening of Fiscal Capacity or Regional Original Income. However, the purpose of implementing regional autonomy is to realize strong Regional Fiscal Capacity (KFD) in creating regional independence. This study aims to determine the effect of Regional Tax (PD), Regional Retribution (RD), Tax Revenue Sharing (BHP) and Gross Regional Domestic Product (GRDP) on Fiscal Capacity (KF). This study uses quantitative analysis techniques, and the method used in sampling in this study is purposive sampling. The number of samples collected is 998 districts/cities, there are 158 outlier data so that the number of samples used in this study is 840 districts/cities. The data that has been collected was analyzed using data analysis which first tested the classical assumptions before testing the hypothesis. Testing the hypothesis in this study using multiple regression analysis with t test, f test, and determinant coefficients. The results of this study indicate that Regional Tax (PD), Regional Retribution (RD), Tax Revenue Sharing (BHP) and Gross Regional Domestic Product (GRDP) have a significant effect on Fiscal Capacity (KF).*

#### Keyword :

*Fiscal Capacity, Regional Taxes, Regional Retribution, Tax Revenue Sharing, Gross Regional Domestic Product.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Otonomi pemerintah daerah menjadi mandiri dalam mengelola kewenangannya. Hal ini dapat dilihat dengan makin kuatnya Kapasitas Fiskal atau Pendapatan Asli Daerah.. Akan tetapi tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah mewujudkan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) yang kuat dalam menciptakan kemandirian daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah di suatu daerah, maka daerah tersebut diberikan kewenangan dalam mengelola keuangannya sendiri, termasuk dalam menggali potensi pendapatan daerahnya. Hal ini diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan perwujudan dari pengalihan sumber daya

atau potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain lain PAD yang sah (Mardiasmo, 2002). Sumber sumber pembiayaan yang diserahkan kepada daerah itu akan dimanifestasikan lewat struktur PAD yang kuat. PAD inilah sumber pembiayaan yang benar benar didapat dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah. Jika suatu struktur PAD kuat maka daerah tersebut juga memiliki pembiayaan yang juga kuat. Sementara DAU dan berbagai bentuk transfer umum dari Pemerintahan Pusat hanya bersifat

pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Joko Tri, 2006:7).

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam penerimaan PAD (Rosalina, 2014). Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (UU No. 34/2000). Pajak daerah memiliki kontribusi yang penting dalam membiayai pemerintah. Karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 34/2000). Perbedaan antara pungutan retribusi dengan sumber pendapatan lainnya adalah dengan ada tidaknya jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang memilikinya. Besarnya PDRB yang dihasilkan oleh masing masing kabupaten/kota tergantung pada potensi SDA dan faktor produksi daerah tersebut. Kinerja ekonomi suatu daerah, dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB dalam nilai riil karena menunjukkan pertumbuhan output sebenarnya (Joko Tri, 2006: 12). Upaya dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah tidak hanya melalui peningkatan PAD, melainkan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah. Peningkatan kapasitas fiskal bukan berarti jumlah anggaran yang besar, tetapi juga optimalisasi anggaran, karena peran pemerintah daerah kedepannya lebih bersifat sebagai fasilitator dan motivator dalam menggerakkan pembangunan di daerah (Osborne and Gaebler, 1993 dalam Anggito, 2005: 28). Karena pada dasarnya

Pemerintah Daerah dihadapkan pada persoalan tingginya kebutuhan fiskal daerah sementara itu kapasitas fiskal daerah tidak mencukupi. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan fiskal (Mardiasmo, 2002 : 147). Jadi pada dasarnya kesenjangan fiskal yaitu selisih negatif antara kebutuhan fiskal daerah dengan kapasitas fiskal daerah.

Kapasitas fiskal Daerah yang kuat adalah mencerminkan kemandirian daerah, variabel yang dipilih dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Bagi Hasil Pajak (BHP) serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diyakini mampu mencerminkan kemandirian daerah. Penelitian dilakukan di empat ratus lima belas kabupaten dan sembilan puluh tiga kota di Indonesia pada periode 2019-2020.

## **2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **a. Pajak Daerah**

Pajak Daerah (PD) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (UU No 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah).

### **b. Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah (RD) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah).

### **c. Bagi Hasil Pajak**

Bagi Hasil Pajak (BHP) adalah pembagian seluruh atau sebagian hasil penerimaan pajak dari suatu tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya dalam rangka pendanaan

penyelenggaraan pemerintahan (Departemen Keuangan RI, 2008: III-37).

d. **Produk Domestik Regional Bruto**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (Robinson, 2004: 19).

e. **Kapasitas Fiskal**

Kapasitas Fiskal adalah kemampuan keuangan suatu daerah untuk membiayai tugas pemerintahan yang mencerminkan melalui pendapatan daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) yang dikaitkan dengan belanja pegawai, dan jumlah penduduk miskin. Peta kapasitas fiskal adalah pengelompokan daerah berdasarkan kapasitas fiskal menjadi tiga kelompok yaitu daerah berkapasitas fiskal tinggi, sedang, dan rendah (Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.02/2005 tentang Peta Kapasitas Fiskal dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah dalam Bentuk Hibah).

f. **Pengaruh Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Bagi Hasil Pajak (BHP), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kapasitas fiskal daerah.**

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program pembangunan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat (Sari dan Yahya, 2009). Dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang penting bagi

daerah dalam memenuhi belanjanya. Pendapatan asli daerah juga dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak pendapatan asli daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri, tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat. Berarti ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya. Penurunan kegiatan ekonomi di berbagai daerah juga menyebabkan penurunan PAD sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah secara otonom. Contoh penelitian yang dilakukan oleh Atria Tiffany Widyaningsih (2018) yang melakukan study kasus pada Kota Pontianak menyatakan bahwa hasil pengujian pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kapasitas Fiskal Daerah dengan menggunakan uji t mempunyai pengaruh secara signifikan. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil hipotesis alternatif sebagai berikut:

$H_1$  : Pajak Daerah (PD) berpengaruh terhadap kapasitas fiskal daerah.

$H_2$  : Retribusi Daerah (RD) berpengaruh terhadap kapasitas fiskal daerah.

$H_3$  : Bagi Hasil Pajak (BHP) berpengaruh terhadap kapasitas fiskal daerah.

$H_4$  : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap kapasitas fiskal.

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kualitas hubungan-hubungannya. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil

pajak, dan produk domestik regional bruto. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kapasitas fiskal.

Populasi adalah kumpulan semua anggota dari objek yang diteliti, sedangkan sampel adalah kumpulan sebagian anggota dari objek yang diteliti (Algifari, 2003: 7). Sedangkan, Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya akan diteliti. Sampel yang digunakan adalah seluruh anggota populasi yaitu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang terdiri dari 514 Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua atau hasil dari pengumpulan oleh suatu instansi dalam bentuk publikasi. Data sekunder diperoleh dari terbitan atau laporan suatu lembaga (Algifari, 2003: 10).

Dalam menganalisis permasalahan data, penulis akan menggunakan metode Uji Deskriptif Statistik. Uji Deskriptif Statistik merupakan pengujian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi (Sugiyono, 2007). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS. Uji statistik deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD), Bagi Hasil Pajak (BHD), dan Produk Domestik Bruto (PDRB) terhadap Kapasitas Fiskal. Variabel terikat/dependen dalam penelitian ini adalah kapasitas fiskal (Y). kapasitas fiskal dalam penelitian ini dalam satuan angka. Sedangkan variabel bebas/independen dalam penelitian ini adalah pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2), Bagi hasil pajak (X3), dan Produk domestik regional bruto (X4). Model regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 PD_{1it} + \beta_2 RD_{2it} + \beta_3 BHP_{3it} + \beta_4 PDRB_{4it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

Y = Variabel kapasitas fiskal (angka)

PD = Variabel pajak daerah (rupiah)

RD = Variabel retribusi daerah (rupiah)

BHP = Variabel bagi hasil pajak (rupiah)

PDRB = Variabel produk domestik regional bruto (rupiah)

$\beta_0$  = Konstanta;  $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  adalah koefisien regresi

$i$  = Kabupaten/Kota

$t$  = Tahun

$\varepsilon$  = Standard Error

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Analisis Regresi Berganda

**Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.537	.012		45.818	.000
	PD	1.364E-12	.000	.497	20.327	.000
	RD	7.266E-12	.000	.299	12.321	.000
	BHP	1.349E-12	.000	.466	28.988	.000
	PDRB	-9.283E-10	.000	-.084	-5.202	.000

a. Dependent Variable: KF

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan rumus regresi yang telah ditemukan, maka model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$KF = 0,537 + 1.364E-12 PD + 7.266E-12 RD + 1.349E-12 BHP + -9.283E-10 PDRB + e$$

Dari persamaan regresi di atas, dapat diinterpretasikan bahwa Nilai Constant ( $\alpha$ ) = 0,537 menunjukkan bahwa jika variabel X atau promosi constant maka rata-rata nilai variabel Y sebesar 0,537. Nilai koefisien Regresi ( $b_1$ ) = 1.364E-12 menunjukkan bahwa jika variabel X meningkat sebesar 1 satuan maka variabel Y juga mengalami penurunan sebesar -1.364E-12, ( $b_2$ ) = 7.266E-12 menunjukkan bahwa jika variabel X meningkat sebesar 1 satuan maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 7.266E-12, ( $b_3$ ) = 1.349E-12 menunjukkan bahwa jika variabel X meningkat sebesar 1 satuan maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar -1.349E-12, ( $b_4$ ) = 9.283E-10 menunjukkan bahwa jika variabel X meningkat sebesar 1 satuan

maka variabel Y juga mengalami penurunan sebesar 9.283E-10.

### Uji Parsial (t-test)

Pengujian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh dari masing masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji t statistik dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. Hasil Uji t**

Variabel	Sig.	Keterangan
PD	0,000	Hipotesis Diterima
RD	0,000	Hipotesis Diterima
BHP	0,000	Hipotesis Diterima
PDRB	0,000	Hipotesis Diterima

Sumber : Output SPSS 25

Dari tabel 2 diketahui hasil dari pengujian menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak, dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Kapasitas Fiskal dengan nilai Pajak Daerah sebesar 0,000, Retribusi Daerah sebesar 0,000, Bagi Hasil Pajak 0,000 dan Produk Domestik Regional Bruto sebesar 0,000 dibuktikan dengan nilai Sig.  $0,000 < 0,05$ .

### Uji Regresi Simultan (F-test)

**Tabel 4.8 Hasil Uji F**

Sumber : Output SPSS 25

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	176.567	4	44.142	1051.533	.000 <sup>b</sup>
	Residual	35.052	835	.042		
	Total	211.619	839			

a. Dependent Variable: KF  
b. Predictors: (constant) PDRB, RD, BHP, PD ...

Berdasarkan tabel 4.8 (uji Anova), menunjukan bahwa nilai F hitung sebesar 1.051,533 dengan tingkat probabilitas 0,000 (signifikansi). Karena probabilitas lebih kecil dari 0,05 dan nilai F lebih besar dari 3,32 maka secara statistik bahwa semua variabel independen yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak, dan Produk

Domestik Regional Bruto secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Kapasitas Fiskal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model penelitian layak untuk digunakan.

### Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R-Square)

Tabel 4.9 Uji Adjusted R Square

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.913 <sup>a</sup>	.834	.834	.204887

a. Predictors: (constant) PDRB, RD, BHP, PD ...  
b. Dependent Variable: KF

Sumber : Output SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa besaran koefisien determinasi atau Adjusted R-Square ( $R^2$ ) adalah 0,834. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 83,4%. Atau dapat diartikan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 83,4% terhadap variabel dependen. Sisanya 16,6% lainnya dipengaruhi variabel lainnya.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak daerah memiliki signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti pajak daerah berpengaruh terhadap kapasitas fiskal.
2. Retribusi daerah memiliki signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti retribusi daerah berpengaruh terhadap kapasitas fiskal.
3. Bagi hasil pajak memiliki signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bagi hasil pajak berpengaruh terhadap kapasitas fiskal.
4. Produk domestik regional bruto memiliki signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap kapasitas fiskal.

## 6. REFERENSI

- Burriel, P. 1971-, Chronis, P., Freier, M., Hauptmeier, S. 1976-, Reiss, L., Stegarescu, D., & Parys, S. van. (n.d.-a). *A fiscal capacity for the euro area lessons from existing fiscal-federal systems*.
- Burriel, P., Chronis, P., Freier, M., Hauptmeier, S., Reiss, L., Stegarescu, D., & Parys, S. Van. (n.d.-b). *A fiscal capacity for the euro area: lessons from existing fiscal-federal systems*. *Documento Ocasional N.º 2009*.
- Cappelli, G. (2016). One size that didn't fit all? Electoral franchise, fiscal capacity and the rise of mass schooling across Italy's provinces, 1870–1911. *Cliometrica*, 10(3), 311–343. <https://doi.org/10.1007/s11698-015-0133-2>
- Dwi Bayu Bawono, A., Kusumawati, E., & Purbasar, H. (n.d.). *Analisis Indeks Kapasitas Fiskal terhadap Pengalokasian Belanja Wajib Bidang Pendidikan dan Kesehatan (Studi pada Kabupaten/Kota se-Jawa)*.
- Fiona, L., Taufik, T., & Ratnawati, D. V. (n.d.). *ANALISIS KAPASITAS FISKAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP ANGGARAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH DI SUMATERA*.
- Herdiyana Jurnal Pajak dan Keuangan, D., & Herdiyana Politeknik Keuangan Negara STAN, D. (2019). *ANALISIS DATA PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH* (Vol. 1, Issue 1).
- Hutagalung, E. M., & Hum, M. (2016). "THE ROLE OF FISCAL DECENTRALIZATION STATE FINANCE IN ORDER STRENGTHEN REGIONAL FISCAL CAPACITY IN INDONESIA." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES*, 30(1). [www.Tijoss.com](http://www.Tijoss.com)
- Istri, C., Widani, K., Made, N., & Erawati, A. (2016). *PENGARUH KAPASITAS FISKAL DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH PADA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA*. In *Oktober* (Vol. 17).
- Kajian, J., Dan, E., Daerah, K., Musaidah, D. A., Ayu, I., Riani, P., & Marlissa, E. R. (n.d.). *ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, INVESTASI DAN PENDUDUK TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, KAPASITAS FISKAL DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI PAPUA* *ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, INVESTASI DAN PENDUDUK TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, KAPASITAS FISKAL DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI PAPUA ABSTRACT*.
- Kapasitas Fiskal Dan Ruang Fiskal Kota Kupang, P., & Ekonomi Unkris Artha Wacana -Kupang, F. (2020). *The Increasing of Fiscal Capacity and Fiscal Space in Kupang City Frits O Fanggidae: Vol. V* (Issue 1). <http://www.jurnalinovkebijakan.com/>
- Kristop, F. (n.d.). *ANALISIS PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, DAN BAGI HASIL PAJAK TERHADAP KAPASITAS FISKAL DAERAH KOTA BATU*.
- Lisna, V., Sinaga, B. M., Firdaus, M., & Sutomo, S. (n.d.). *Dampak Kapasitas Fiskal terhadap Penurunan Kemiskinan: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan Impact of Fiscal Capacity on Poverty Reduction: A Policy Simulation Analysis. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 14(1), 1–26.
- MENTER/KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA*. (n.d.). [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)
- Ngr, A. A., Narindra, M., & Jati, I. K. (n.d.). *INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MEMODERASI PENGARUH KINERJA KAPASITAS FISKAL DAERAH DAN SiLPA PADA DAYA SAING DAERAH*.
- Oki, K. K. (2019). *Dampak Otonomi Daerah Terhadap Kapasitas Fiskal Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT Impact Of Regional Autonomy On Fiscal*

- Capacity In The District Of Timor Tengah Utara, Ntt Province. In *EKOPEM | Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Vol. 4, Issue 2). Online.
- Oktavilia, S., Aulia Rahman, Y., Bella Silvia, R., & Author, C. (2020). Economics Development Analysis Journal Improving Regional Fiscal Capacity in Central Java Province Indonesia Article Info. *Economics Development Analysis Journal*, 9(2), 2020. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/e-daj>
- Pasimani, P. (n.d.). *The Economic Rationale of an EMU Fiscal Capacity. PMK-No.-120-Th-2020-tentang-Peta-Kapasitas-Fiskal-Daerah.* (n.d.). *PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.* (n.d.). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kota di Indonesia 2016-2020.* (n.d.).
- Rizqy Ramadhan, P. (2019). PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA UTARA. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>
- Syarifuddin, S., & Damayanti, R. A. (2015). Good governance and fiscal capacity in regional expansion: A holistic analysis of qualitative perspective. *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 18(1), 15. <https://doi.org/10.14414/jebav.v18i1.378>
- Temenggung, Y. A., Moenek, R., Suwanda, D., & Mulyadi, M. (2020). The Fiscal Capacity of the New Autonomous Region (DOB) in Increasing Economic Growth and Eradication of the Poor. *Jurnal Bina Praja*, 12(1), 75–87. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.75-87>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA.* (n.d.).
- UU Nomor 32 Tahun 2004.* (n.d.).
- Widyaningsih, A. T. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kapasitas Fiskal Kota Pontianak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 7(3), 215. <https://doi.org/10.26418/jebik.v7i3.25893>
- Yudistira Dama, H., Lopian, A. L. C., Sumual, J. I., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2016). PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA MANADO (TAHUN 2005-2014). In *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* (Vol. 16, Issue 03).